

## **Kelas, Kasta dan Gender: Perempuan dalam Parlemen di India**

SHIRIN RAI

LAPORAN-LAPORAN MUTAKHIR DI INDIA MEMPERLIHATKAN bahwa banyak politisi perempuan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, apalagi hendak menyamakan jurang gender yang ada, dan ini menunjukkan perlunya peningkatan analisa peran yang dimainkan perempuan dalam perpolitikan India. Hal ini didukung oleh pemilihan baru-baru ini.

Laporan *Times of India* edisi bulan Februari 1998 banyak menguatkan tentang apa yang telah dibahas dalam buku pedoman ini: yakni “tanggung jawab domestik, kurangnya kekuasaan finansial, memuncaknya kriminalisasi politik dan ancaman pembinasaaan karakter” menyebabkan kesulitan yang meningkat bagi perempuan untuk menjadi bagian dari kerangka politik. Terlebih lagi, politisi perempuan sendiri mengatakan bahwa di dalam partai-partai politik pun, amat jarang ditemukan perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan. Sesungguhnya, “kandidat-kandidat perempuan biasanya merupakan lahan dari suara pemilih yang ‘hilang’ di mana partai tidak mau ‘membuang’ seorang kandidat laki-laki”.

Di bagian ini kita mencoba menguji hasil kajian anggota parlemen perempuan di India semasa Parlemen X (1991-1996). Pembahasan ditujukan pada tiga bidang utama: profil sosial perempuan anggota parlemen; jalur yang mereka tempuh untuk meraih posisi politik mereka; dan wilayah kebijakan publik tempat mereka berada.

## ***Sistem Politik India***

### *Sistem Kepartaian dan Representasi Perempuan*

India menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai yang kuat. Majelis rendah disebut *Lok Sabha* (majelis rakyat) beranggotakan 545 orang. Majelis tinggi disebut *Rajya Sabha* (majelis negara bagian) dengan anggota 250 orang. Wakil perempuan pada tahun 1991 sebanyak 5,2 persen dari seluruh anggota *Lok Sabha* dan 9,8 persen dari seluruh anggota *Rajya Sabha*.<sup>1</sup> Persentase ini lebih rendah jika dibandingkan dengan parlemen sebelumnya (1989). Hasil pemilihan umum tahun 1996 memperlihatkan kemunduran yang jauh dalam hal representasi perempuan, tapi pada pemilihan tahun 1999, 8,8 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kecenderungan yang demikian cukup mencemaskan seperti ditampilkan oleh prakarsa negara baru-baru ini untuk menjamin representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik.

Salah satu sebab rendahnya representasi perempuan tersebut mungkin dikarenakan menguatnya sistem kepartaian itu sendiri, yang dapat mengarah pada marjinalisasi politik berdasarkan isu, atau pengambilalihan gerakan-gerakan berdasarkan isu tunggal. Gerakan perempuan di India harus menghadapi isu yang demikian.<sup>2</sup> Namun, partai-partai politik India secara organisasional lemah dan masih bergantung pada elite setempat.<sup>3</sup> Barangkali ini merupakan faktor kedua bagi perlawanan atas implementasi prakarsa politik yang tanggap-gender (*gender sensitive*).

### *Gerakan Perempuan dan Isu Representasi*

Tuntutan yang lebih besar bagi representasi perempuan dalam institusi-institusi politik di India sebenarnya tidak berjalan sistematis sampai dengan terbentuknya Komite Mengenai Status Perempuan di India (*Committee on the Status of Women in India* atau CSWI) yang pernah menerbitkan laporannya pada tahun 1976. Sebelum komite ini terbentuk, fokus gerakan perempuan

yang mulai tumbuh hanya berkisar pada persoalan peningkatan posisi sosial ekonomi perempuan.<sup>4</sup> Laporan CSWI memberi kesan bahwa representasi perempuan dalam institusi-institusi politik, terutama pada tingkat akar rumput, perlu ditingkatkan melalui kebijakan kuota kursi untuk perempuan.<sup>5</sup> Pada tahun 1988, Rencana Perspektif Nasional untuk Perempuan mengusulkan supaya kuota 30 persen bagi perempuan diperkenalkan di seluruh tingkatan badan-badan pemilihan. Kelompok-kelompok perempuan mendesak agar kuota dibatasi pada aras *panchayat* (dewan desa) untuk mendorong partisipasi akar rumput dalam politik. Konsensus di sekitar tuntutan itu berhasil dengan dimasukkannya Amandemen ke-73 dan Amandemen ke-74 dalam konstitusi India tahun 1993.

Masalah kuota kembali mencuat pada tahun 1995, namun kali ini tertuju pada perempuan dalam parlemen. Pada awalnya, sebagian besar partai politik setuju dengan usulan tersebut. Ketika rancangan undang-undang isu ini diperkenalkan dalam Parlemen XI pada tahun 1997, beberapa partai dan kelompok mengajukan sejumlah keberatan. Keberatan ini terpusat di sekitar dua isu pokok: pertama, isu kuota yang tumpang-tindih bagi perempuan pada umumnya dan untuk perempuan dari kasta yang lebih rendah. Kedua, isu elitisme. Sebagian besar kelompok perempuan merasa bahwa isu kasta dapat memecah-belah kaum perempuan. Banyak pula yang merasa khawatir mengenai pemberian hak-hak istimewa kepada perempuan elite dengan menjamin kursi bagi mereka di parlemen, sedangkan sebelumnya mereka mendukung kuota bagi perempuan pada aras akar rumput *panchayat*. Hingga kini amandemen tersebut belum disahkan parlemen. Namun, pemerintah nasionalis Hindu BJP berjanji untuk mengajukan rancangan undang-undang kuota yang lain untuk perempuan dalam parlemen.

### ***Profil Perempuan di Parlemen India***

Wakil 39 perempuan dalam Parlemen India periode 1991-1996 sebagian besar berasal dari kalangan kelas menengah, perempuan profesional, yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan gerakan-gerakan perempuan. Sebagian besar di antara mereka memasuki dunia politik lewat hubungan keluarga, sebagian melalui gerakan-gerakan mahasiswa dan ornop, serta sebagian lagi merupakan hasil prakarsa negara yang bertujuan meningkatkan representasi kasta-kasta yang lebih rendah.

*Mayoritas perempuan dalam parlemen India adalah perempuan-perempuan elite. Kendati peran publik mereka menantang sejumlah stereotip, posisi kelas mereka sendiri seringkali memberi mereka deretan pilihan yang jauh lebih besar ketimbang yang tersedia bagi perempuan-perempuan lebih miskin.*

### *Gender dan Kasta dalam Parlemen*

Kasta merupakan ciri terpenting dalam kehidupan publik dan politik India. Sebagian besar anggota parlemen perempuan dalam Parlemen X adalah anggota-anggota kasta yang lebih tinggi. Misalnya, ada enam perempuan dari kasta Brahmana. Ini mewakili 17,14 persen anggota parlemen perempuan, angka yang cukup lumayan, sementara kasta Brahmana hanya 5,52 persen dari jumlah seluruh penduduk. Namun, penting untuk menjaga pembuatan korelasi yang sederhana antara kasta dengan representasi politik. Misalnya, dari enam perempuan kasta Brahmana anggota parlemen, dua di antaranya dari Partai Komunis India. Dalam kasus itu, faktor kasta kurang penting ketimbang latar belakang istimewa kelas mereka. Lebih jauh, keduanya adalah produk dari pergerakan politik, perjuangan nasional dan gerakan anti-keadaan darurat.

Jumlah perempuan yang mampu mengambil manfaat dari sistem kuota berdasarkan kasta di India masih tetap sedikit. Kendati 22 persen kursi parlemen disisihkan untuk kelompok kasta yang terdaftar (*Scheduled Castes*), perempuan hanya menduduki 4,1 persen dari kursi yang disediakan. Dua anggota parlemen perempuan berasal dari suku-suku yang diakui oleh pemerintah (*Scheduled Tribes*). Namun, dari 39 anggota parlemen perempuan di Lok Sabha X (mewakili 7 persen dari total), 14 persen adalah dari kasta yang terdaftar. Dua anggota parlemen perempuan berasal dari kasta “terbelakang” dan mewakili konstituensi terbuka. Karena itu kasta mempengaruhi profil, loyalitas, dan tugas dari para wakil rakyat di Parlemen India.

### *Kelas, Posisi Sosial, dan Gender dalam Kehidupan Publik*

Dari 39 anggota parlemen perempuan Lok Sabha 1991–1996, 36 orang berpendidikan pasca-sarjana; dalam Rajya Sabha 14 dari 17 perempuan adalah sarjana. Posisi kelas perempuan-perempuan ini jelas lebih penting dengan tingkat pendidikan mereka ketimbang kasta. Hanya satu dari tujuh anggota parlemen perempuan yang berasal dari kasta lebih rendah yang bukan sarjana, dan seorang perempuan anggota parlemen dari kasta yang terdaftar dalam

Rajya Sabha berpendidikan pasca-sarjana. Tingkat pendidikan juga tercermin dalam profil profesional perempuan-perempuan ini. Dari anggota parlemen perempuan di Rajya Sabha, misalnya, 30 persen adalah pengacara, dan 25 persen di Lok Sabha adalah guru atau dosen.

*Asal kelas sebagian besar perempuan ini berang kali merupakan faktor terpenting keberhasilan mereka masuk ke dalam sistem politik.*

Usia sebagian besar anggota parlemen perempuan (sekitar 65 persen) pada usia antara 30-an dan 60-an, dan karena itu tidak mempunyai tanggung jawab lagi membangun keluarga muda. Berkat pola perkawinan universal yang ada di India, angka untuk anggota-anggota parlemen yang tidak menikah luar biasa tinggi, dan menunjukkan tekanan-tekanan sosial terhadap perempuan yang bergabung dalam kehidupan publik. Bagi mereka yang telah menikah, tekanan-tekanan kehidupan publik agak mudah diatasi oleh posisi kelas mereka. Sebagian besar anggota parlemen mampu mengaji pembantu rumah tangga. Dalam banyak kasus, sistem keluarga yang menyatu, atau setidaknya dukungan kuat dari keluarga, juga turut membantu. Namun, kendala-kendala kehidupan keluarga tetap menjadi kepedulian bahkan bagi perempuan dari kelas atas.

Perempuan memiliki strategi-strategi yang berbeda untuk mengatasi kendala-kendala itu. Jika keluarga telah menerima karir seorang perempuan dalam dunia politik, dia dapat merundingkannya dengan keluarganya. Hal ini mungkin bisa dilakukan jika keluarga itu adalah sebuah keluarga elite politik dengan lebih dari satu anggotanya telah ikut serta dalam politik. Jika seorang perempuan telah bergiat dalam kehidupan politik sebelum menikah, dia akan menghadapi tekanan sangat besar dari pihak keluarga suami untuk menyesuaikan diri dengan peran tradisional yang tidak memperbolehkan adanya keleluasaan bagi kelanjutan aktif karir politik. Pilihan politisi perempuan dalam kasus ini adalah menyesuaikan diri dengan harapan-harapan keluarga dan mundur dari kehidupan publik atau meninggalkan keluarga untuk meraih masa depan yang tidak pasti dalam partai politik. Dalam kasus yang terakhir, kurangnya dukungan keluarga dan label perceraian jelas tidak menguntungkan perempuan dalam dunia politik.

Kelas juga menengahi pengaruh agama. Dengan hanya satu perempuan Muslim anggota parlemen dalam Rajya Sabha dan seorang di Lok Sabha, perempuan Muslim secara signifikan sangat kurang terwakili. Dr. Najma

Heptullah, yang juga Wakil Ketua Rajya Sabha, berasal dari kelas elite dan memiliki latar belakang terdidik, dan memperoleh dukungan atas karyanya baik dari keluarga asal maupun keluarga perkawinan. Margaret Alva, seorang Kristen, dan menjabat Menteri Negara, dan Ketua Pendiri Komisi Nasional untuk Perempuan India, juga berasal dari latar belakang yang sama. Dalam kedua kasus itu, keluarga-keluarga mereka telah lama terlibat dalam pergerakan nasional, dipengaruhi oleh ideologi liberal, dan berpendidikan tinggi.

Jadi, mayoritas perempuan dalam parlemen India adalah perempuan-perempuan elite. Kendati peran publik mereka menantang sejumlah stereotip, posisi kelas mereka sendiri seringkali memberi mereka deretan pilihan yang jauh lebih besar ketimbang yang tersedia bagi perempuan-perempuan lebih miskin.

### ***Memasuki Sistem***

Sangatlah mengherankan, partisipasi aktif dalam gerakan-gerakan perempuan tidak menjadi salah satu jalur masuk ke dalam partai-partai politik formal oleh anggota parlemen perempuan.

*“Kesepadanan laki-laki” - asumsi bahwa akses kehidupan politik perempuan berkat dukungan, bantuan, dan hubungan keluarga, khususnya pihak suami – telah menjadi penjelasan yang dominan bagaimana perempuan memasuki kehidupan politik.*

#### *Kekeluargaan atau lebih?*

“Kesepadanan laki-laki” (*male equivalence*) telah menjadi penjelasan yang dominan bagaimana akses kehidupan politik perempuan. Asumsi di sini adalah akses kehidupan politik perempuan berkat dukungan, bantuan, dan hubungan keluarga, khususnya pihak suami. Dalam contoh 15 perempuan yang disurvei, sepertiga dari anggota parlemen perempuan, misalnya, mempunyai latar belakang “dukungan keluarga”. Namun, dalam argumen yang sangat bagus terhadap teori ini, Carol Wolkowitz menunjukkan bahwa “kesepadanan laki-laki” adalah kerangka konseptual yang tidak mencukupi.<sup>6</sup> Pertama, karena ini merupakan ruang publik (yaitu institusi-institusi negara, pers, dan diskursus politik) yang harus dirundingkan jika keputusan keluarga mengajukan seorang

perempuan dalam politik akan berhasil; ini bukan persoalan pribadi tetapi persoalan publik. Kedua, dalam banyak kasus, para suami sama sekali tidak mendukung pencalonan sang istri. Ini adalah tekanan tokoh-tokoh partai politik yang mendesakkan isu dalam banyak kasus. Sistem pembagian kursi yang terpusat dalam partai-partai menjelaskan konteks ini. Perhatian partai dengan tingkat representasi kelompok-kelompok tertentu di dalam barisannya, dan berakibat pada legitimasi partai di kalangan kelompok yang kurang terwakili, mungkin merupakan motif untuk memasukkan perempuan.

#### *Gerakan Sosial dan Gerakan Politik*

Bersama dengan “jalinan kekeluargaan” dan prakarsa negara, faktor penting lain menjepit akses kehidupan politik perempuan tampaknya adalah gerakan-gerakan sosial dan politik. Gerakan-gerakan ini telah menciptakan jendela peluang dan beberapa perempuan dapat memanfaatkannya untuk akses kehidupan politik.

Misalnya, gerakan nasional adalah mobilisator penting para perempuan. Sumbangan Gandhi yang mengangkat perempuan untuk masuk ke dalam kancha politik sangat tertanam; gerakan kiri juga memobilisasi perempuan.<sup>7</sup> Organisasi-organisasi perempuan dibentuk di bawah payung dan pengawasan partai – Kongres Mahila dan Federasi Seluruh Perempuan India (*All India Women's Federation* atau CPI). Namun, tidak satu pun perempuan yang diwawancarai untuk survei ini mempunyai hubungan kuat dengan sayap partai mereka menjelang mereka masuk ke dalam politik parlementer.

Gerakan-gerakan hak sipil dan anti-keadaan darurat yang dipimpin Jaiprakash Narayan (JP) pada tahun 1975-1977 adalah sebuah gerakan politik penting yang membawa mahasiswa-mahasiswa ke garis depan politik nasional. Banyak perempuan, baik sayap kanan maupun sayap kiri, turut bergabung dengan gerakan ini yang terus berlanjut dalam politik. Akhirnya, dalam konteks politik India sekarang, partai-partai fundamentalis dan komunal ikut memobilisasi perempuan.<sup>8</sup> Salah seorang anggota parlemen perempuan paling kharismatis yang bernama Uma Bharti adalah produk dari meningkatnya militansi Hindu dalam perpolitikan India. Dia adalah anggota Vishwa Hindu Parishad, sayap yang dimobilisasikan BJP, dan seorang yang berprofesi sebagai “penceramah” naskah-naskah suci Hindu. Dia berada di garis terdepan gerakan yang menghancurkan Masjid Babri di Ayodhya.<sup>9</sup>

## *Kepemimpinan Politik dan Kuota*

*Kuota untuk perempuan sebagai strategi memasuki arena politik mendapat dukungan yang kian meluas di kalangan anggota parlemen perempuan, kendati kenyataannya sangat sedikit yang memasuki sistem melalui jalur itu, sebagian besar perempuan masih berpegang kuat pada argumen meritokrasi.*

Pengaruh individu tokoh nasional juga merupakan faktor penting yang menghalangi teori “kesepadanan laki-laki”. Walaupun Indira Gandhi, misalnya, hanya sedikit memajukan representasi perempuan dalam politik, Rajiv Gandhi menerima asas kuota kursi bagi perempuan. Dia memprakasai peraturan-peraturan yang berdampak langsung terhadap diikutsertakannya perempuan dalam politik, misalnya, ketetapan tahun 1993 untuk reservasi 33 persen kursi pemilihan di *panchayat* bagi perempuan. Seperti yang telah kita bahas, siapa yang mampu mengambil manfaat reservasi demikian akan ditengahi oleh kelas, kesukuan dan kasta. Namun, dukungan dari negara dan pemimpin politik/negara dapat menjadi penting bagi perempuan yang menginginkan akses kepada sistem politik. Kuota untuk perempuan sebagai strategi memasuki arena politik mendapat dukungan yang kian meluas di kalangan anggota parlemen perempuan, kendati kenyataannya sangat sedikit yang memasuki sistem melalui jalur itu, dan berpegang kuat pada argumen meritokrasi. Kebanyakan anggota parlemen perempuan mendukung Amandemen ke-81, yang menjamin 33 persen kuota perempuan di parlemen, sekalipun disiplin partai tidak memperbolehkan mereka memberi suara untuk hal ini. Isu demikian menyoroti kendala-kendala yang ditimbulkan oleh sistem kepartaian bagi politisi perempuan.

### ***Gender dan Kekuatan Publik: Apa yang Dilakukan Anggota Parlemen Perempuan***

Dari 20 anggota parlemen perempuan Kongres Lok Sabha 1991-1996, tidak satupun yang menduduki jabatan menteri dalam kabinet; dua orang menjadi menteri negara; dan dua orang lagi wakil menteri negara.<sup>10</sup> Di Raja Sabha, dari tujuh anggota parlemen perempuan Kongres, seorang adalah menteri negara. Jabatan-jabatan kementerian itu termasuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penerbangan Sipil dan Pariwisata, Kesehatan dan Kesejahteraan



Keluarga, serta Kepegawaian dan Pengaduan Umum. Kesemua ini umumnya dianggap sebagai “jabatan-jabatan lunak,” walaupun tugas-tugas pasti seberat kementerian yang lain.

Seorang anggota parlemen perempuan Kongres adalah Wakil Ketua Rajya Sabha. Pada tingkat partai, seorang anggota parlemen masuk dalam komisi disiplin partai, dan seorang lagi adalah Presiden Kongres Mahila. Di antara perempuan BJP, satu orang anggota Rajya Sabha adalah jurubicara untuk garis ekonomi dan politik umum partai. Dari sepuluh anggota Lok Sabha, satu orang adalah wakil presiden partai, dan dua orang ada dalam komite eksekutif nasional partai-partai mereka.

*Representasi perempuan dalam parlemen, kendati penting sebagai landasan bagi keadilan sosial dan legitimasi sistem politik, tidak dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam peningkatan representasi dari berbagai kepentingan perempuan.*

Sistem perangsang dan penghambat kelembagaan pada aras partai dan parlemen berdampak terhadap isu yang diajukan perempuan dalam parlemen. Sebagian besar anggota parlemen perempuan yang diwawancarai tidak mempunyai isu-isu perempuan yang bermutu tinggi dalam daftar kepentingan mereka. Mereka merasa cukup untuk duduk dalam komite-komite yang berkaitan dengan ekonomi, hubungan internasional, dan perdagangan. Sebagai perempuan yang ambisius, anggota parlemen ini lebih ingin berada di mana kekuasaan dan pengaruh saling bertemu.

#### *Masalah Pertanggungjawaban*

Salah satu isu penting dalam setiap pembahasan gender dan representasi adalah mengenai konstituensi yang diwakili perempuan. Karena tidak ada konstituensi “hanya perempuan,” maka anggota parlemen perempuan tidak bertanggung jawab kepada perempuan sebagai perempuan. Dan juga, ketika isu mengenai perempuan ini diangkat di parlemen, perempuan-perempuan ini diharapkan untuk berpartisipasi dalam setiap perdebatan. Isu-isu tentang kesejahteraan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan mendapat tempat khusus dalam mempersatukan anggota parlemen perempuan.

Isu-isu tersebut dibahas di dalam “ruang khusus perempuan” di parlemen. Namun, seperti seluruh anggota parlemen yang ditanyai sudah menjelaskan,

mereka adalah “perempuan partai” pertama; dan hampir selalu ikut petunjuk para ketua partai.

*Sebagian besar anggota parlemen perempuan yang diwawancarai tidak mempunyai isu-isu perempuan yang bermutu tinggi dalam daftar kepentingan mereka. Mereka merasa cukup untuk duduk dalam komite-komite yang berkaitan dengan ekonomi, hubungan internasional, dan perdagangan.*

Beberapa anggota parlemen perempuan kadang-kadang diminta oleh kepemimpinan partai untuk ikut melibatkan diri dalam sayap perempuan partai. Sekalipun anggota anggota parlemen perempuan tidak perlu melihat peran ini sebagai peningkatan status mereka di dalam partai, beberapa diantaranya ternyata berhasil memenuhi pengaruh secara penuh dalam kepemimpinan partai.

Sebagai “perempuan partai” dengan ambisi politik, anggota parlemen perempuan menanggapi rangsangan dan hambatan kelembagaan yang dibebankan kepada mereka. Semua faktor ini membatasi potensi anggota parlemen perempuan yang mewakili kepentingan perempuan India yang meliputi berbagai isu. Akibatnya, segera tampak hubungan yang sedikit teratur antara kelompok-kelompok perempuan dengan anggota parlemen perempuan. Pengecualian di sini tentu saja sayap perempuan dari partai-partai politik yang dapat bertindak menjembatani anggota parlemen perempuan. Hal ini memberi kemungkinan anggota parlemen perempuan untuk menjadi saluran penghubung antara kepemimpinan partai dengan anggota perempuannya. Mereka juga diajak untuk berkonsultasi dari waktu ke waktu oleh kepemimpinan partai mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keluarga dan hak-hak perempuan. Tetapi kelompok-kelompok perempuan non-partai tampaknya tidak mendekati anggota parlemen perempuan.<sup>11</sup>

## ***Kesimpulan***

Representasi perempuan dalam parlemen, kendati penting sebagai landasan bagi keadilan sosial dan legitimasi sistem politik, tidak dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam peningkatan representasi dari berbagai kepentingan perempuan.

Sekalipun kita tidak dapat menerima bahwa dengan semakin banyaknya perempuan dalam kantor-kantor publik akan berarti semakin baiknya perlakuan terhadap perempuan secara umum, masih terdapat alasan-alasan penting untuk menuntut representasi perempuan yang lebih besar dalam kehidupan politik. Pertama berdasarkan intuisi-jumlah perempuan yang semakin banyak dalam kantor publik, mengartikulasikan kepentingan, dan seolah-olah memiliki kekuasaan, semakin banyak hirarkhi gender dalam kehidupan publik yang akan terganggu. Tanpa terlihat mencukupi, jika tidak sebanding, kehadiran dalam sistem politik “di ambang representasi,”<sup>12</sup> kemampuan satu kelompok untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, atau kultur politik yang mengerangkakan sistem perwakilan, menjadi terbatas. Kenyataan ini dipertegas oleh berbagai sumbangan lainnya dalam buku ini. Selanjutnya, kenyataan bahwa perempuan-perempuan ini sebagian besar adalah perempuan elite, mungkin berarti dampak yang mereka miliki pada kesadaran publik tidak sebanding ketimbang jumlah yang ditunjukkan mereka.

Kedua, dan lebih penting, kita dapat mencari strategi-strategi yang digunakan perempuan untuk mengakses ruang publik dalam konteks sistem sosio-politik patriarki. Perempuan-perempuan ini berhasil menumbangkan batas-batas gender, dan bekerja sangat agresif di wilayah yang didominasi laki-laki. Dapatkah perempuan lain belajar dari contoh ini? Masalahnya disini adalah, tentu saja, persis bahwa perempuan-perempuan ini adalah sekelompok elite. Asal kelas sebagian besar perempuan ini berangkali merupakan faktor terpenting keberhasilan mereka masuk ke dalam sistem politik. Namun, kita dapat menguji apakah gerakan-gerakan sosio-politik memberi kesempatan kepada perempuan untuk menggunakan strategi-strategi tertentu yang mungkin mampu menumbangkan hirarkhi gender dalam politik. Akhirnya, kita dapat memeriksa dinamika antara politik kelembagaan dengan perpolitikan akar rumput. Sebagaimana diperlihatkan dalam kajian ini, “politisasi gender” dalam sistem politik India sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan gerakan perempuan.

Wakil perempuan, karena itu, mendapat keuntungan dari keberhasilan gerakan perempuan ini. Namun, ada interaksi yang terbatas antara wakil perempuan dengan gerakan perempuan — satu wilayah kelemahan penting di balik baik keefektifan perempuan anggota parlemen maupun gerakan perempuan. Barangkali inilah isu yang diperlukan gerakan perempuan untuk disampaikan sebagai bagian perluasan agenda di abad ke 21.

## **Catatan**

- 1 Swarup, H.L., Niroj Sinha, Chitra Ghosh, dan Pam Rajput. 1994. "Women's Political Engagement in India", dalam B. Nelson dan N. Chowdhury, red. *Women and Politics Worldwide*. New Haven: Yale University Press. Hal. 362.
- 2 CWDS. 1994. *Confronting Myriad Oppressions: The Western Regional Experience*. New Delhi; CWDS. 1995. *Towards Beijing: A Perspective from the India Women's Movement*. New Delhi.
- 3 Bjorkman, James W. 1987. "India: Party, Personality and Dynasty." Dalam Alan Ware, red. *Political Parties*. Oxford: Blackwell.
- 4 CWDS. 1994. Hal. 19 – 25.
- 5 Pemerintah India, 1974.
- 6 Wolkowitz, Carol, dalam Haleh Afshar, red. 1987. *Women, State and Ideology: Studies From Africa and Asia*. London and New York: Routledge, 1987.
- 7 Chattopadhyaya, K. 1983. *Indian Women's Battle for Freedom*. New Delhi: Abhinav Press; Joshi, P. 1989. *Gandhi on Women*. New Delhi: Navjivan Press.
- 8 Sarkar, T. dan U. Butalia, red. 1991. *Women And Right Wing Movements: India Experiences*. London : Zed Press.
- 9 Sengketa atas Masjid Babri timbul karena desakan fundamentalis Hindu sayap kanan partai BJP bahwa masjid ini dibangun oleh penakluk Muslim dengan menghancurkan kuil Hindu tempat kelahiran Lord Ram, seorang pemuka Hindu. Pemerintahan Kongres yang berkuasa beturut-turut mencoba menyelesaikan isu ini dengan menghindari pengambilan keputusan yang tidak menjauhkan para pemilih Muslim atau Hindu. Hal ini akhirnya mengarahkan fundamentalis Hindu pada tahun 1991 untuk bergerak menuju masjid yang saat itu dihancurkan dan dibantu oleh polisi negara.
- 10 Pada tahun 2001, ada tiga menteri kabinet perempuan dan lima menteri negara perempuan. Lihat [www.indianembassy.org/special/cabinet/cabinet.htm](http://www.indianembassy.org/special/cabinet/cabinet.htm).
- 11 Rai, S.M. 1995. "Women Negotiating Boundaries: Gender, Law and the India State". *Social and Legal Studies*, Vol. 4, No. 3, September.
- 12 Kymlicka, W. 1995. *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press

## **Acuan dan Bacaan Lanjutan**

Afshar, Haleh, red. 1987. *Women, State and Ideology. Studies from Africa and Asia*. London dan New York : Routledge.

Agnihotri, I. dan V. Mazumdar. 1995. "Changing Terms of Political Discourse: Women's Movement in India, 1970s-1990s" *Economic and Political Weekly*. Vol. XXX, No. 29. Hal. 1869-1878.

Akerkar, S. 1995. "Theory and Practice of Women's Movement in India: A Discourse Analysis," *Economic and Political Weekly*. Vol. XXX, No. 27. Hal. WS-2-WS-22.

Alvarez, S. 1990. *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transition Politics*. Princeton: Princeton University Press.

Bjorkman, James W. 1987. "India: Party, Personality and Dynasty". Dalam Alan Ware, red. *Political Parties*. Oxford: Blackwell.

Chattopadhyaya, Kamaladevi. 1983. *Indian Women's Battle for Freedom*. New Delhi : Abhinav Press.

- CWDS (Center for Women's Development Studies). 1994. *Confronting Myriad Oppressions: The Western Regional Experience*. New Delhi.
- CWDS. 1995. *Towards Beijing: A Perspective from the India Women's Movement*. New Delhi.
- Hoskyns, C. dan S. Rai. 1996. "Gender, Class and Representation: India and the European Union," Makalah yang diajukan pada Konferensi *Political Studies Association*, Glasgow, 10 April.
- India, Pemerintah. 1988. *"National Perspective Plan for Women 1988-2000."* New Delhi: Department of Women and Child Development.
- Joshi, P. 1989. *Gandhi on Women*. New Delhi: Navjivan Press.
- Kumar, Radha. 1989. "Contemporary Indian Feminism". *Feminist Review*, No. 3, Autumn. Hal. 20-29
- Kymlicka, W. 1995. *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Liddle, J. dan R. Joshi, 1986. *Daughters of Independence*. New Delhi: Kali for Women.
- Phillips, A. 1991. *Engendering Democracy*. Cambridge: Polity
- Rai. S.M. 1995. "Women and Public Power: Women in the Indian Parliament." *IDS Bulletin*. Vol. 26, No. 3, Juli.
- Rai. S.M. 1995. "Women Negotiating Boundaries: Gender, Law and The Indian State". *Social and Legal Studies*. Vol. 4, No. 3, September.
- Sarkar, T. dan U. Butalia, red. 1995. *Women and Right-Wing Movements: Indian Experiences*. London: Zed Press.
- Swarup, H.L., Niroj Sinha, Chitra Ghosh, dan Pam Rajput. 1994. "Women's Political Engagement in India", dalam B. Nelson dan N. Chowdhury, red. *Women and Politics Worldwide*. New Haven: Yale University Press.